

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai instansi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan penganguran perannya diharapkan optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama disusun berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi, dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, terdapat beberapa permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2017-2022, diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Ketenagakerjaan

Kurangnya kompetensi dan kualitas pencari kerja dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas

dan kurang harmonisnya Hubungan Industrial di perusahaan ;

2. Urusan Ketrasmigrasian

keterbatasan lahan sebagai lokasi permukiman transmigrasi, masih kurangnya pemerataan kesejahteraan dan kurangnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Dapat lihat dari tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kurangnya kompetensi dan kualitas pencari kerja	Belum merata minat pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Pendidikan yang belum sesuai dengan klaster kompetensi
1.	Kurangnya tenaga kerja yang ditempatkan	Rendahnya tingkat pendidikan	Tingginya jumlah penduduk lulusan SD, SMP
2.	Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di perusahaan	Belum seluruh perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial yang sesuai standart	Minimnya pengetahuan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan

3.	Rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung	Masih rendahnya kesejahteraan warga transmigrasi	Kurangnya produktifitas transmigran
----	--	--	-------------------------------------

Sedangkan berdasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu strategis urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja
- Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan
- Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah *“Babel sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”*.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Penetapan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan

sebelumnya, serta dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun renstra kabupaten.

Berikut adalah Arah Kebijakan dan Program Kementerian :

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja dilaksanakan melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dengan sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan melalui program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memperoleh fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
3. Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dengan sasaran diterapkannya prinsip-prinsip Hubungan Industrial di tempat kerja;
4. Peningkatan peran perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan sasaran meningkatnya

- penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja;
5. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan) melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dan program perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sampai saat ini belum teridentifikasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau ke depannya dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sampai saat ini secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan sektor pertambangan dan sektor pertanian. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi sementara sektor pertambangan memiliki keterbatasan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sektor pertanian memiliki keterbatasan ketersediaan lahan, maka mutlak diperlukan adanya perubahan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas produktifitas tenaga kerja dan pembinaan Hubungan Industrial dan kesehatan kerja, serta penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan.

Berikut ini adalah Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

1. Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di tempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.